



Pengaruh Kedisiplinan Pegawai Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Ani Maulida, Nellis Mardhiah

Jurusan Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

ARTICLE INFORMATION

Received: July 20, 2021
Revised: September 17, 2021
Accepted: September 27, 2021
Available online: October 10, 2021

KEYWORDS

Discipline, Effectiveness of Public Services, Employees

CORRESPONDENCE

Phone: 081361335392
E-mail: nellismardhiah@utu.ac.id

A B S T R A C T

The study aims to determine the effect of employee discipline on the effectiveness of public services at the District Head Office of Bubon, West Aceh Regency. This research uses a quantitative approach with an causal associative method. The data collection technique in this study used a questionnaire or questionnaire technique with scale measurements using a Likert Scale. The research instrument test used validity and reliability tests. Then the data analysis technique used simple linear regression analysis, product moment correlation, correlation coefficient and hypothesis testing using IBM Statistical Package for Social Science. The result of research conducted on 50 respondents at the Head Office of Bubon District, West Aceh Regency showed that there is a significant influence between employee discipline on the effectiveness of public services shows a positive direction. Based on the summary of the table, it is found that the influence of discipline (X) on the effectiveness of public services (Y) is 0.406 or 40.6% categorized as "quite influential". Where the value of 40.6% shows the effect of the discipline variable (X) on the effectiveness of public service variables (Y) of 40.6%, while the rest is influenced by other factors.

PENDAHULUAN

Organisasi merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berkaitan serta saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dimana sistem yang saling berkaitan tersebut tentu akan berjalan baik apabila orang-orang yang berada di dalamnya melaksanakan tanggung jawab dan mampu mengatur serta mengelolanya (Tjokro, 2019). Di instansi pemerintah, pegawai merupakan pihak yang memegang peranan serta kedudukan yang penting, tanpa adanya pegawai tentunya instansi tersebut tidak dapat menjalankan aktivitasnya dalam melayani masyarakat.

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan untuk melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada suatu organisasi. Menurut Thoha (2003) dalam Suleman (2019) menjelaskan bahwa pelayanan juga berarti sebagai suatu usaha yang di lakukan oleh seseorang di suatu organisasi maupun instansi pemerintah guna untuk memberi kemudahan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pada dasarnya pelayanan publik itu bukan kepentingan pemerintah, akan tetapi pelayanan publik mewajibkan pemerintah agar memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Tidak di pungkiri, masyarakat tentu akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Karena masyarakat selalu ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas, dimana dalam pelayanan tersebut terdapat kendala-kendala atau hambatan yang dapat menghambat suatu pelayanan yang akan diberikan sehingga pelayanan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan.

Efektivitas ialah suatu konsep yang dapat memberi gambaran tentang keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Cakra (2020), efektivitas merupakan suatu kemampuan dan kesanggupan dalam memilih tujuan yang tepat guna mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Efektivitas dapat dilihat dari sejauhmana sebuah instansi atau organisasi itu melaksanakan semua tugas pokoknya sehingga mencapai sasaran. Pengukuran efektivitas merupakan suatu gambaran pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dimasa sekarang ini pelayanan publik masih bisa dikatakan kurang efektif hal itu dikarenakan masih kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelayanan bisa dikatakan efektif jika pagawainya mampu menyelesaikan tugasnya. Artinya, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tersebut bergantung pada kemampuan dari pegawai itu sendiri. Sedangkan pelayanan bisa dikatakan efisien apabila dalam menyelesaikan tugasnya ia mengerjakannya dengan benar dan sesuai prosedur yang berlaku (Zanni, 2015).

Kedisiplinan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun kelompok sama halnya bagi suatu organisasi ataupun instansi pemerintah karena mereka yang berdisiplin tinggi umumnya berprestasi lebih tinggi pula (Widjaja, 1990). Menurut Hasibuan (2005). kedisiplinan merupakan suatu kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati norma-norma serta peraturan di dalam organisasi ataupun instansi pemerintah yang berlaku. Sedangkan Yasir (2016) berpendapat bahwa disiplin adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan situasi lingkungan kerja

yang tertib, efisien dan efektif melalui suatu sistem peraturan yang jelas. Disiplin adalah hal mutlak yang dilakukan untuk melancarkan jalannya suatu organisasi. Dimana tanpa diterapkannya disiplin dalam diri seseorang maka ia tidak akan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian, disiplin yang baik tentu akan menggambarkan diri seseorang memiliki besar rasa tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini bisa memacu dorongan dan semangat kerja serta terwujudnya tujuan instansi, pegawai, dan masyarakat. Setiap pemimpin organisasi maupun instansi pemerintah senantiasa berusaha agar para pegawainya mempunyai disiplin yang baik.

Kedisiplinan juga merupakan suatu keadaan yang terbentuk melalui serangkaian proses yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan serta kesetiaan akan suatu pekerjaan (Hasibuan, 2014). Nilai-nilai tersebut jika diterapkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya maka ia tidak akan merasa terbebani, bahkan ia sendiri akan merasa terbebani apabila ia lakukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Sutrisno (2016) menjelaskan bahwa dalam mengukur kedisiplinan pegawai harus diciptakan peraturan serta tata tertib sebagai petunjuk yang harus diwujudkan oleh semua pegawai. Peraturan yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) peraturan jam masuk, jam istirahat dan jam pulang; (2) peraturan tentang berpakaian dan tingkah laku dalam bekerja; (3) peraturan tentang cara melakukan dan menyelesaikan pekerjaan serta cara berhubungan dengan orang lain; dan (4) peraturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh selama didalam sebuah organisasi maupun instansi.

Akan tetapi, di sebagian instansi pemerintah seringkali para aparatnya melakukan kesalahan-kesalahan yang akibat dari kesalahan itu akan berdampak negatif terhadap pelayanan seperti halnya datang terlambat, bermalas-malasan serta ia lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga hal itu tentu akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yang baik maka sangat dibutuhkan penerapan kedisiplinan yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan. Oleh karena itu, kedisiplinan dalam hal pekerjaan sangatlah penting bagi suatu organisasi (Akay et al., 2021).

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bab I pasal 1 yang menyatakan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kesanggupan untuk pegawai negeri sipil dalam menaati kewajiban serta menghindari larangan yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan atau kedinasan, jika peraturan tersebut di langgar dan tidak ditaati serta tidak dipatuhi maka pegawai tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang dimaksud dilakukan guna untuk membina pegawai yang telah melakukan pelanggaran supaya tidak mengulangi lagi dan memperbaiki dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, kedisiplinan yang baik akan mencerminkan seseorang memiliki besarnya rasa tanggung jawab akan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, maka ia mampu memperoleh efektivitas kerja yang tinggi juga. Demikian pula disiplin waktu dan tata tertib serta peraturan yang telah di tetapkan oleh instansi. Dalam pelayanan publik pemerintah daerah tidak sekedar melayani masyarakat, tetapi juga pemerin tah daerah harus berupaya membuat pelayanan yang dibarengi

dengan kreatifitas, kemampuan dan pengetahuan, serta kedisiplinan sehingga mampu terlaksana birokrasi yang terbuka, partisipatif, bersih dan jujur, akuntabilitas serta efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi utama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai pelayan bagi masyarakat. Sesuai dengan paradigma tersebut aparatur pemerintah daerah khususnya aparatur pemerintah Kecamatan secara tidak langsung dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal yang dapat memuaskan masyarakat. Oleh karena hal ini menjadikan Pemerintahan Kecamatan sebagai ujung tombak dalam menyelenggarakan roda pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat.

Bubon merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat yang memiliki luas wilayah kecamatan 129,58 km² dengan letak ibukota kecamatan di Banda Layung. Letak geografis Kecamatan Bubon yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Woyla, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samatiga, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Arongan Lambalek serta sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI. Pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat diperoleh bahwa masih adanya sebagian kecil aparatur pegawai atau staf yang masih kurang menyadari akan kedisiplinan diri sebagai Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu, hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat khususnya pengaruh kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik. Maka, berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi tujuan dan fokus utama penulis adalah adakah pengaruh antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan gambaran diantara variabel-variabel tersebut (Siyoto & Sodik, 2015). Alasan menggunakan jenis metode asosiatif kausal karena metode ini berusaha untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan lainnya baik itu dua variabel maupun lebih (Firmansyah & Mistar, 2020)

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai, tenaga harian lepas (THL), Tenaga Bakti dan beberapa tokoh masyarakat yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuisioner dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini ada dua yang menjadi variabel penelitian diantaranya Kedisiplinan sebagai variabel bebas (variabel X) dan Efektivitas Pelayanan Publik sebagai variabel terikat (variabel Y). Adapun jumlah responden yang akan mengisi angket pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 orang yang terdiri dari 18 orang berjenis kelamin perempuan dan 32 orang berjenis kelamin laki-laki. Uji instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Kemudian teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear sederhana, koefisien korelasi product

moment, koefisien korelasi serta uji hipotesis menggunakan IBM Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 25.

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan semestara akan suatu rumusan masalah yang harus dibuktikan letak kebenarannya oleh Peneliti berdasarkan data yang diperoleh (sugiyono,2017). Dugaan semestara atau hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. H_0 = Terdapat pengaruh antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
2. H_1 = Tidak terdapat pengaruh antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data identitas responden pada penelitian ini yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari 18 orang (36%) berjenis kelamin perempuan dan 32 orang (64%) berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan berdasarkan identifikasi usia yaitu usia < 30 tahun berjumlah 9 orang (18%), usia 30-49 tahun berjumlah 22 orang (44%), dan usia 50> berjumlah 19 orang (38%).

Uji Validitas

Uji validitas adalah sebuah pengujian untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Di dalam penelitian ini pengujian validitas menggunakan IBM Statistical Package for Social Science (SPSS). Untuk menguji validitas pada penelitian ini diketahui jumlah responden sebanyak 50 orang ($N=50$) dengan taraf signifikansi 5%, maka dihasilkan $(N-2) = (50-2) = 48$. Jadi dari perhitungan tersebut diperoleh R Tabel sebesar 0.285. hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1 Uji Validitas Instrument Penelitian

Variabel X	<i>Corrected Item Total</i>	Variabel Y	<i>Corrected Item Total</i>
1	0.552	1	0.676
2	0.599	2	0.394
3	0.521	3	0.293
4	0.680	4	0.804
5	0.578	5	0.596
6	0.583	6	0.774
7	0.759	7	0.583
8	0.520	8	0.554
9	0.483	9	0.738
10	0.385	10	0.699
11	0.582	11	0.744
12	0.649	12	0.682

Sumber: SPSS Statistical versi 25

Pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel kedisiplinan (X) dan variabel efektivitas pelayanan publik (Y) memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai 0.285 nilai R tabel. Artinya dari tiap-tiap item pernyataan dari masing-masing variabel kedisiplinan (X) dan variabel efektivitas pelayanan publik (Y) dinyatakan valid.

Uji Realibilitas

Uji realibilitas merupakan suatu pengujian yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner penelitian. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian realibilitas adalah nilai keandalan Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha >0.60 maka kuesioner dinyatakan realibel (konsisten), begitu juga jika nilai Cronbach Alpha <0.60 maka kuesioner dinyatakan tidak realibel atau tidak konsisten (Sujarweni, 2014). Adapun hasil uji realibilitas penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. 2 Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Nilai Batas Realibilitas</i>	Kesimpulan
Kedisiplinan	0.787	0.600	Reliabel
Efektivitas Pelayanan Publik	0.829	0.600	Reliabel

Sumber: SPSS Statistical versi 25

Berdasarkan hasil uji realibilitas pada tabel 2 di atas maka dapat diketahui bahwa variabel kedisiplinan (variabel X) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.787 dan untuk variabel efektivitas pelayanan publik (variabel Y) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0.829. Dalam hal ini jelas terlihat baik variabel X maupun variabel Y sudah mampu memenuhi syarat atau kriteria batas nilai realibilitas yaitu < 0.600. Oleh karena itu variabel kedisiplinan (X) dan variabel efektivitas pelayanan publik (Y) dinyatakan realibel atau konsisten.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan hubungan secara linear antara variabel independen (variabel X) dengan variabel dependen (variabel Y). Analisis regresi linear sederhana ini guna untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif.

Tabel. 3 Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	18.813	4.771		3.943	.000
	Kedisiplinan	.614	.107	.637	5.726	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelayanan Publik

Sumber: SPSS Statistical versi 25

Berdasarkan analisis data pada tabel 3 diperoleh persamaan regresi $Y = a + bX$ atau $Y = 18.813 + 0.614 X$. Artinya, jika variabel kedisiplinan (X) berubah maka efektivitas pelayanan publik (Y) akan berubah juga. Dengan demikian nilai positif menunjukkan adanya perubahan yang searah, apabila kedisiplinan meningkat maka efektivitas pelayanan publik juga meningkat sebesar nilai koefisien regresi yaitu 0.614. Dimana koefisien regresi senilai 0.614 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai variabel

kedisiplinan (X) ditingkatkan menjadi 1 satuan maka nilai variabel efektivitas pelayanan publik (Y) bertambah sebesar 0.614. Oleh karena koefisien regresi bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa arah pengaruh hubungan kedisiplinan terhadap efektivitas pelayanan publik adalah positif. Dengan demikian semakin tinggi kedisiplinan pegawai maka akan semakin meningkatkan pula efektivitas pelayanan publik.

Analisis Korelasi Product Moment dan Koefisien Determinasi

Tabel. 4 Koefesien Korelasi dan Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.637 ^a	.406	.393	4.207	

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan

Sumber : SPSS Statistical versi 25

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4, diperoleh bahwa nilai korelasi product moment variabel kedisiplinan terhadap efektivitas pelayanan publik yaitu sebesar 0.637. Hasil uji korelasi di atas di peroleh r hitung lebih besar dari r tabel, dimana r tabel memiliki nilai 0.279 ($0.637 > 0.279$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang cukup antara kedisiplinan terhadap efektivitas pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Pada hasil uji analisis tabel 4 diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0.406, dalam hal ini berarti 40.6% pengaruh variabel

kedisiplinan (X) terhadap variabel efektivitas pelayanan publik (Y) adalah sebesar 40.6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah variabel X (kedisiplinan) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel Y (efektivitas pelayanan publik) jika F-hitung lebih besar dari F-tabel dengan tingkat signifikan $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 diterima.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	580.250	1	580.250	32.789	.000 ^b
	Residual	849.430	48	17.696		
	Total	1429.680	49			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pelayanan Publik

b. Predictors: (Constant), Kedisiplinan

Sumber: SPSS Statistical versi 25

Dengan demikian variabel kedisiplinan mempunyai F- hitung sebesar 32.789 dan nilai signifikan sebesar 0.000. Dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 maka H_0 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan terhadap efektivitas pelayanan publik.

Hasil penelitian yang di lakukan terhadap 50 responden pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik dilihat dari nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Koefisien b = 0.614 bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik pada

PEMBAHASAN

Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah positif. Artinya, semakin tinggi kedisiplinan pegawai maka akan semakin meningkatkan pula efektivitas pelayanan publik. Hasil korelasi product moment menunjukkan adanya korelasi (pengaruh) dan determinasi (hubungan) antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (r) sebesar 0.637 dan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.406. Dalam hal ini berarti 40.6% pengaruh variabel kedisiplinan (X) terhadap variabel efektivitas pelayanan publik (Y) adalah sebesar 40.6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil uji korelasi pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif serta signifikan antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Hal ini telah dilakukan pengujian dan dibuktikan kebenarannya bahwa semakin tinggi kedisiplinan seorang pegawai maka semakin tinggi juga efektivitas pelayanan publik. Hal ini tentu akan berpengaruh positif terhadap suatu instansi dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya. Sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yaitu terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik.

Setiap instansi tentu mengharapkan adanya suatu perubahan menjadi lebih baik. Hal ini bisa diwujudkan jika pegawai atau staf di dalam organisasi atau instansi itu sendiri menegakkan yang namanya kedisiplinan dan profesionalitas kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Jika hal ini sudah diterapkan dalam diri pegawai maka akan mudah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Simatupang et al., (2018) tentang analisis disiplin kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan masyarakat di Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. Dimana hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa kedisiplinan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Layaman dan Hartati (2018) menunjukkan hasil bahwa juga terdapat pengaruh antara disiplin terhadap efektivitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pengaruh kedisiplinan pegawai (X) terhadap efektivitas pelayanan (Y) maka dapat disimpulkan :

1. Hasil uji korelasi di peroleh r hitung lebih besar dari r tabel, dimana r tabel memiliki nilai 0.279 ($0.637 > 0.279$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang "cukup" antara kedisiplinan terhadap efektivitas pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Pengujian korelasi antara kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik menunjukkan arah positif. Artinya, nilai positif menunjukkan adanya perubahan yang searah, apabila kedisiplinan meningkat maka efektivitas pelayanan publik juga meningkat sebesar nilai koefisien regresi yaitu 0.614.
2. Berdasarkan tabel model summary diperoleh nilai R Square sebesar 0.406, dalam hal ini berarti 40.6% pengaruh variabel kedisiplinan (X) terhadap variabel

efektivitas pelayanan publik (Y) adalah sebesar 40.6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Kedisiplinan pegawai terhadap efektivitas pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat memiliki pengaruh yang signifikan dilihat dari variabel kedisiplinan yang mempunyai nilai F -hitung sebesar 32.789 dan nilai signifikan sebesar 0.000 (nilai signifikan $0.000 < 0.05$).

REFERENSI

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Cakra, C. (2020). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Kantor Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 148–154. <https://doi.org/10.51817/prj.v8i2.246>
- Firmansyah, D., & Mistar. (2020). Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Bima. *Jurnal Dimensi*, 9(2), 202–216.
- Hasibuan, S. . M. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Revisi). Bumi Aksara.
- Hasibuan, S. . M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Layaman, & Hartati, S. (2018). *Studi Efektivitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon*. 13–33. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fzhd6>
- Simatupang, J. H., Pabalik, D., & Nurchasanah, S. (2018). Peranan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Efektifitas Pelayanan Masyarakat Di Distrik Sorong Manoi Kota Sorong. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 44–51. <http://sandyherdians.wordpress.com/2013/04/0>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing.
- Sujarweni, V. W. (2014). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Suleman, S. (2019). Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–13. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Ketii). Kencana Prenada Media Grup.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Pustaka Belajar Widodo.
- Tjokro, C. I. (2019). Perilaku Organisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(1), 60–65.
- Widjaja, A. . (1990). *Administrasi Kepegawaian Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Yasir, A. (2016). Efektivitas Penerapan Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 5(1), 62–66. www.publikasi.unitri.ac.id
- Zanni, H. (2015). Efektivitas Pelayanan dalam Pemberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda. *E Journal Administrasi Negara*, 3(4), 1006–1018.

Sumber Lainnya :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

